

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam jangka waktu tertentu. Di lingkungan internal, laporan keuangan digunakan oleh manajemen dan jajaran direksi, sedangkan di pihak eksternal dimanfaatkan oleh investor, Lembaga keuangan, instansi pemerintah, serta masyarakat luas (Abdurrachman & Suhartono, 2020). Secara garis besar, laporan keuangan berfungsi untuk menyajikan data mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, serta aliran kas perusahaan. Informasi tersebut mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna dan juga mencerminkan bentuk tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang berikan oleh mereka (IAI, 2009).

Sumber Daya Manusia berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan, baik sebagai penyusun maupun pengawas. Sebaliknya, sistem komputer hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara kualitas laporan tetap bergantung pada kompetensi dan integritas SDM (Prasaty & Anisah, 2023). demikian, dibutuhkan SDM yang tidak hanya mempunyai pemahaman yang komprehensif, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, guna mencegah praktik manipulasi laba maupun tindakan kecurangan lainnya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Chantia et al., 2021). Jika laporan keuangan mengandung salah saji material, maka informasi yang disajikan menjadi tidak relevan untuk dasar pengambilan

keputusan, karena analisis yang dilakukan tidak didasarkan pada data yang sebenarnya. Salah satu motivasi kecurangan adalah untuk kepentingan pemilik, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) menyatakan, penipuan merupakan sesuatu yang dikerjakan secara sengaja dengan melanggar hukum, melalui manipulasi terhadap pihak lain serta penyampaian informasi yang tidak benar demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sesuai dengan hasil *Survei Fraud Indonesia* (SFI) tahun 2023 yang dilakukan oleh (ACFE, 2023), tindak pidana korupsi merupakan jenis kecurangan yang sering terjadi di Indonesia sekaligus menyebabkan kerugian terbesar. Rata-rata kerugian yang ditimbulkan per kasus *fraud* mencapai \$1,5 juta, dan diperkirakan perusahaan kehilangan sekitar 5% dari pendapatan tahunan akibat *fraud*. Jenis kecurangan yang paling umum ditemukan adalah penyalahgunaan aset, yang mencakup 86% dari total kasus. Namun, kecurangan pelaporan keuangan dengan menyebabkan kerugian terbesar dengan median kerugian mencapai \$593.000. Sementara itu, korupsi berada di posisi tengah baik dari segi frekuensi maupun dampak kerugian, dengan median kerugian sebesar \$150.000.

Salah satu kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan adalah yang melibatkan PT Timah (Persero) Tbk pada tahun 2015. Perusahaan ini diduga memalsukan laporan keuangan untuk semester pertama tahun tersebut guna menutupi kondisi keuangan yang terus memburuk. Perusahaan mengalami rugi operasional sebesar Rp 59 miliar, dan sekitar 80% wilayah tambangnya diserahkan ke mitra usaha dugaan manipulasi ini diperkuat oleh pernyataan ketua IKT, Ali Samsuri. Lebih lanjut pada tahun 2024, PT Timah kembali menjadi sorotan publik kembali terjerat kasus korupsi besar dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 300

triliun berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerugian tersebut mencakup pembengkakan biaya sewa smester sebesar Rp 2,2 triliun dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada periode 2015 hingga 2022, mencakup sekitar 170.363 hektar, dimana 81.462 hektar berada di luar area perizinan resmi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan direktur utama PT Timah yang diduga terlibat dalam penyamaran aktivitas tambang ilegal (<https://www.tambang.co.id/>).

Menurut (ACFE, 2019) sektor pertambangan di Indonesia menempati posisi ketiga sebagai sektor paling rentan terhadap kecurangan. Berbagai teori telah digunakan untuk menjelaskan motif manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. ISA 240 mengidentifikasi tiga faktor utama pendorong kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, yang dikenal sebagai *Fraud Triangle* (Clinard & Cressey, 1953). Model ini kemudian dilanjutkan menjadi *Fraud Diamond* oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) dengan menambah unsur kemampuan. Selanjutnya, (Horwath, 2011) memperkenalkan *Fraud Pentagon* dengan memasukkan elemen arogansi, dan (Vousinas, 2019) kemudian memperluas menjadi *Fraud Hexagon* dengan menambah satu elemen Kolusi. Penambahan unsur kolusi dalam fraud hexagon mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang memicu kecurangan.

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan (Clinard & Cressey, 1953). Tekanan ini bisa muncul karena beban kerja yang berlebihan, target yang sulit dicapai, serta persaingan antar bagian atau departemen, yang semuanya berkontribusi terhadap munculnya tekanan di lingkungan kerja (Setiawan et al., 2022). Menurut (Albretch et al., 2012), semakin

berat tekanan yang dirasakan individu tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan orang tersebut melakukan kecurangan. Manajemen sebagai perwakilan dari pemilik perusahaan (principal) sering kali berada dalam situasi tertekan, misalnya karena tuntutan untuk menunjukkan kinerja yang baik atau meningkatkan nilai perusahaan di pasar saham. Tekanan seperti ini kerap dijadikan alasan untuk justifikasi (*rationalization*) untuk memanipulasi laporan keuangan. Risiko kecurangan menjadi lebih tinggi ketika ada peluang untuk melakukannya dan kemungkinan untuk terungkap sangat kecil. Peluang (*opportunity*) menjadi pemicu awal, sedangkan tekanan dan justifikasi menjadi pendorong kecurangan. Namun, kecurangan dalam skala besar dengan metode yang rumit tidak akan terjadi tanpa keterlibatan orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam perusahaan. Artinya, pelaku kecurangan harus memiliki (*capability*) kapasitas atau keahlian yang cukup untuk melewati sistem pengendalian internal, mengendalikan situasi, dan menyusun strategi agar aksinya tidak mudah diketahui. Rasa lebih unggul (*arrogance*) dan sikap sombong karena posisi yang dimiliki, ditambah sifat serakah, membuat pelaku merasa kebal terhadap pengendalian yang ada, selain itu, kecurangan seringkali melibatkan lebih dari satu orang dan dilakukan melalui kolusi (*collusion*), yaitu kerja sama secara diam-diam antar individu dalam organisasi untuk melanggar aturan demi keuntungan pribadi.

Melalui analisis *fraud hexagon*, kecurangan dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk dapat dijelaskan dari enam faktor utama. Pada aspek tekanan (*pressure*), dapat diketahui bahwa PT Timah mengalami tekanan dari pihak luar untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang positif. Tekanan ini mendorong pihak manajemen melakukan rekayasa dalam laporan keuangan agar kondisi perusahaan terlihat baik di hadapan publik dan para pemangku kepentingan. Dari

sisi kesempatan (*opportunity*), kecurangan dimungkinkan karena adanya celah dalam sistem pengendalian internal, yang memberikan ruang bagi direksi untuk menyusun laporan keuangan fiktif. Faktor rasionalisasi (*rationalization*) juga memainkan peran penting, dimana pihak direksi menganggap bahwa tindakan manipulasi dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai merupakan sesuatu yang wajar dalam praktik bisnis demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya, faktor kapabilitas (*capability/competence*) terlihat dari kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh jajaran direksi dalam mengoordinasikan serta mengarahkan pegawai untuk terlibat dalam praktik kecurangan tersebut. Arogansi (*arrogance*) ditunjukkan oleh sikap direksi yang merasa bahwa mereka berada di atas sistem dan pengendalian internal, sebagaimana tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan baik, padahal sedang mengalami kerugian besar secara berturut-turut. Terakhir faktor kolusi (*collusion*) menjadi pendorong utama kecurangan, dimana motif pribadi seperti keinginan mempertahankan jabatan membuat pelaku rela melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi maupun citra perusahaan.

Merujuk pada kasus kecurangan laporan keuangan yang diuraikan sebelumnya, teori fraud yang dikembangkan oleh (Vousinas, 2019) mengemukakan bahwa tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*). Faktor pertama dalam model fraud hexagon ini adalah tekanan. Tekanan yang dirasakan oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh individu lainnya tekanan ini dapat berupa tekanan pribadi maupun tekanan pekerjaan (Suryandari et al., 2023). Tekanan tersebut meliputi dorongan untuk memenuhi kebutuhan finansial, mencapai target, rasa frustrasi terhadap lingkungan kerja,

merasa tidak dihargai (Ratmono & Frendy, 2022). Tekanan menjadi pendorong seseorang untuk bertindak yang tidak pantas atau menyimpang, sebagai respons yang berasal dari dalam diri maupun luar diri individu (Achmad et al., 2022). Semakin besar tekanan yang dirasakan oleh seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk melakukan kecurangan (Rustiarini, 2019). Kecurangan umumnya terjadi ketika individu menghadapi persoalan yang sulit untuk diungkap kepada orang lain, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun non keuangan (Clinard & Cressey, 1953). Tekanan dapat muncul karena berbagai alasan, salah satunya adalah kebutuhan mendesak dalam keluarga (Simanjuntak et al., 2024). Ketidaknyamanan dalam pekerjaan, serta lingkungan kerja yang tidak mendukung, yang dapat memicu protes maupun perilaku menyimpang (Koomson et al., 2020).

Pada penelitian ini, tekanan dianalisis melalui indikator *external pressure* yang diukur memakai rasio leverage. Rasio leverage merupakan ukuran perbandingan antara total utang dan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Kondisi tersebut mencerminkan potensi gagal bayar yang tinggi, sehingga menimbulkan tekanan bagi pihak manajemen (Minh et al., 2019). Rasio ini juga berguna dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pinjamannya. Ketika leverage berada pada tingkat yang tinggi, hal ini menunjukkan besarnya beban utang yang ditanggung, yang sekaligus mencerminkan tingginya risiko kredit. Penelitian oleh (Einde et al., 2019) memperkuat pandangan ini, dengan menyatakan bahwa rasio leverage yang tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan karena manajemen terdorong untuk melakukan manipulasi. Tindakan manipulative tersebut bertujuan agar

jumlah utang terlihat lebih rendah, sehingga kinerja keuangan perusahaan tampak lebih baik di mata pihak eksternal (Apriliana & Agustina, 2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Achmad et al., 2022), (Rustiarini, 2019) dan (Einde et al., 2019) menunjukkan bahwa tekanan eksternal yang diukur melalui rasio leverage memiliki pengaruh terhadap terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Temuan ini serupa juga diperoleh dari penelitian (Junus et al., 2025), yang menyimpulkan bahwa *external pressure* berkontribusi terhadap praktik kecurangan pelaporan keuangan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh (Indriaty & Thomas, 2023) serta (Naldo & Widuri, 2023), yang menyatakan bahwa tekanan eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan.

Unsur kedua pada model fraud hexagon yang digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan adalah peluang (*opportunity*). Peluang ini merujuk pada kondisi dimana individu atau kelompok memiliki kesempatan untuk menjalankan kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam penelitian ini, aspek kesempatan diukur melalui indikator ketidakefisienan pengawasan (*ineffective monitoring*). *Ineffective monitoring* menggambarkan kondisi ketika pengendalian internal dalam perusahaan tidak berjalan secara optimal. Indikator ini diproksikan melalui persentase jumlah dewan komisaris independen (BDOUT) yang mencerminkan tingkat ketidak efisienan pengawasan (Handoko et al., 2020). Temuan dari (Aviantara, 2021), (Kamal et al., 2016), dan (Situngkir & Triyanto, 2020) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, yang diukur melalui proporsi komisaris independen, berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Peneliti lain yang menentang hal tersebut dilakukan oleh (Achmad et al., 2023) dan (Indrijawati et al., 2025) mengindikasikan

bahwa faktor kapabilitas memang memiliki pengaruh, namun tidak signifikan terhadap praktik kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

Unsur ketiga dalam *fraud hexagon* dalam mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan ialah rasionalisasi (*rationalization*). Pelaku kecurangan seringkali memiliki pola pikir yang membuat mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakan mereka (Koomson et al., 2020). Pola pikir ini dikenal dalam literatur tentang kecurangan sebagai rasionalisasi. Rasionalisasi dijelaskan sebagai sikap individu yang memungkinkan mereka membenarkan tindakan tidak bermoral yang dilakukan seolah-olah bukan merupakan tindakan kriminal (Abdullahi & Mansor, 2017). Dengan kata lain, rasionalisasi memungkinkan individu yang melakukan kecurangan untuk membenarkan tindakannya agar terlihat dapat diterima secara pribadi, sekaligus mempertahankan citra diri sebagai sosok yang jujur dan tidak bersalah, seolah-olah hanya terjebak dalam kondisi sulit, bukan sebagai pelaku kejahatan (Said et al., 2018). Dalam penelitian ini, aspek rasionalisasi diukur melalui indikator pergantian auditor, yang menggunakan variabel *dummy* (Prasetia & Dewayanto, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Suryandari et al., 2023) dan (Nurcahyono et al., 2021) menemukan bahwa pergantian auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian (Achmad et al., 2023), (Sahla & Ardianto, 2024) dan (Ibrahim et al., 2024), yang menyimpulkan bahwa perubahan auditor tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Unsur keempat dalam teori *fraud hexagon* yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan dalam laporan keuangan adalah kemampuan atau kapabilitas individu untuk melakukan kecurangan tersebut. Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004) menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan

keterampilan, pengetahuan, rasa percaya diri, serta posisi yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Auditor merupakan pihak yang memahami secara mendalam proses akuntansi, termasuk celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan akuntansi kreatif. Kompetensi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang terjadinya kecurangan. Dalam penelitian ini, kemampuan diukur melalui pergantian anggota direksi dalam perusahaan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Apriliyani et al., 2024), (Achmad et al., 2022), (Devi et al., 2021) dan (Peprah, 2018) menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam struktur kepemimpinan perusahaan berhubungan positif dengan potensi terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan temuan dari (Setiorini et al., 2021) yang menyatakan bahwa seluruh elemen dalam teori hexagon memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Achmad et al., 2023), (Handoko & Natasya, 2019) dan (Minarti & Hapsari, 2021), yang menyimpulkan bahwa kemampuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya manipulasi dalam laporan keuangan.

Unsur berikutnya yang terdapat pada fraud hexagon adalah arogansi (*arrogance*). Menurut (Cahya & Aris, 2023) arogansi ditunjukkan pada kurangnya kesadaran seseorang untuk berempati terhadap orang lain dan merasa memiliki keunggulan serta berhak untuk serakah yang membuatnya yakin bahwa dirinya kebal terhadap aturan. Sifat arogansi dapat memberikan dampak negatif, baik terhadap perusahaan perorangan maupun perusahaan korporat karena dapat merusak operasional perusahaan (Horwath, 2011). Seorang manajer yang memiliki karakter arogan sering merasa dirinya lebih unggul di perusahaan karena merasa memiliki kedekatan dengan atasan serta koneksi yang kuat. Sikap arogan dapat terlihat ketika seorang CEO berupaya keras mempertahankan posisinya

dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, pelaku arogan diidentifikasi melalui seberapa sering foto CEO ditampilkan dalam *annual report* perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Achmad et al., 2023) dan (Christian et al., 2019) membuktikan bahwa ego merupakan salah satu faktor prediktif dalam teori hexagon tentang kecurangan, sebaliknya (Achmad et al., 2022) menunjukkan bahwa arogansi tidak terdapat pengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan.

Unsur terakhir yang terdapat pada fraud hexagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah kolusi (*collusion*). kolusi artinya sebagai perilaku dan sikap tidak jujur yang melibatkan dua atau lebih dalam menjalin kesepakatan, baik antar karyawan perusahaan, antar kelompok, individu dari perusahaan yang berbeda, maupun antar perusahaan yang bekerja sama (Vousinas, 2019). Semakin tinggi tingkat kerja sama tidak sehat (kolusi), maka peluang terjadinya kecurangan juga semakin besar (Achmad et al., 2022). Di industri pertambangan, praktik kolusi bisa muncul dalam proses pengurusan izin, lelang proyek, atau saat pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, kolusi dinilai berdasarkan jumlah komisaris independen yang merangkap jabatan di perusahaan lain. Hasil penelitian dari (Achmad et al., 2023), dan (Naldo & Widuri, 2023) menyatakan bahwa kolusi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan. Namun, temuan dari (Cahya & Aris, 2023) menunjukkan kolusi berperan dalam terjadinya penyimpangan dalam laporan keuangan.

Pendeteksian kecurangan erat kaitannya dengan efektivitas pengawasan dari pihak internal perusahaan, yang memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh, dibutuhkan keterlibatan aktif dari tiga elemen utama, yaitu komite audit, pengendalian internal, dan audit internal. Ketiga

komponen ini memiliki peran krusial dalam menekan kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan (Januanto, 2018). Penelitian dari Kusumosari & Rahardjo (2023), yang menunjukkan bahwa ketiga fungsi pengawasan internal tersebut mampu secara signifikan mencegah terjadinya fraud. Selain itu, menurut Siregar & Rohman (2024), keberhasilan komite audit dalam melaksanakan pengawasan internal dapat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan serta menghambat perilaku menyimpang dari manajemen. Dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut, penelitian ini menjadikan komite audit sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk memperkuat pengaruh elemen-elemen dalam fraud hexagon terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada (Achmad et al., 2023), namun terdapat perbedaan dalam hal objek yang diteliti, rentan waktu penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Sektor industri yang dikaji menjadi perbedaan utama, sektor manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor perbankan, termasuk struktur biaya, pelaporan, dan eksposur terhadap risiko keuangan. Kemudian perbedaan yang terletak pada periode penelitian dimana peneliti terdahulu mengambil tahun 2017-2021 sedangkan penelitian ini mengambil periode di tahun 2022-2024. Periode yang lebih baru dalam penelitian memungkinkan evaluasi terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan praktik akuntansi terkini. Peneliti sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda, sementara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi logistik untuk mengolah data.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, terdapat ketidaksesuaian hasil antara variabel-variabel dalam teori *fraud hexagon* mengungkap kecurangan dalam laporan keuangan. Beberapa peneliti, menunjukkan hasil yang berbeda-

beda mengenai pengaruh unsur seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, sikap arogan dan kolusi terhadap potensi manajemen dalam melakukan manipulasi data keuangan. Selain itu, industri manufaktur terutama sektor pertambangan termasuk kategori yang rawan terhadap praktik kecurangan, seperti yang terjadi pada kasus PT Timah Tbk. Karena alasan tersebut, peneliti merasa penting untuk menguji seberapa efektif model fraud hexagon jika diterapkan di sektor yang berbeda yakni manufaktur. Penelitian ini juga menambahkan peran komite audit sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk menguji apakah perbedaan pengawasan internal mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh dari elemen-elemen fraud hexagon terhadap kecurangan laporan keuangan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2022 – 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah (*Pressure*) yang diukur dengan *external pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah (*Opportunity*) yang diukur *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah (*Rationalization*) yang diukur dengan *change in auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah (*Capability*) yang diukur dengan *change in director* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

5. Apakah (*Arrogance*) yang diukur dengan *frequent number CEO's picture* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah (*Collusion*) yang diukur dengan *The total number of commissioners who have concurrent positions* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Capability* terhadap kecurangan laporan keuangan?
11. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan?
12. Apakah Komite Audit memoderasi pengaruh *Collusion* terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh (*Pressure*) yang diukur dengan *external pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Pengaruh (*Opportunity*) yang diukur *ineffective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Pengaruh (*Rationalization*) yang diukur dengan *change in auditor* terhadap kecurangan laporan keuangan?

4. Pengaruh (*Capability*) yang diukur dengan *change in director* terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Pengaruh (*Arrogance*) yang diukur dengan *frequent number CEO's picture* terhadap kecurangan laporan keuangan?
6. Pengaruh (*Collusion*) yang diukur dengan *The total number of commissioners who have concurrent positions* terhadap kecurangan laporan keuangan?
7. Pengaruh Komite Audit memoderasi *pressure* terhadap kecurangan laporan keuangan?
8. Pengaruh Komite Audit memoderasi *Opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan?
9. Pengaruh Komite Audit memoderasi *Rationalization* terhadap kecurangan laporan keuangan?
10. Pengaruh Komite Audit memoderasi *Capability* terhadap kecurangan laporan keuangan?
11. Pengaruh Komite Audit memoderasi *Arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan?
12. Pengaruh Komite Audit memoderasi *Collusion* terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun praktik. Adapun penjelasan mengenai manfaat yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Tujuan dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam mengidentifikasi praktik kecurangan yang masih sering ditemukan dalam laporan keuangan. Secara khusus, penelitian ini membahas enam elemen utama

yang terdapat dalam teori fraud hexagon, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, sifat arogan dan kolusi di sektor pertambangan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperluas wawasan terkait berbagai factor yang dapat memicu terjadinya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari sisi praktik, penelitian ini memiliki manfaat yang cukup penting. Bagi Lembaga atau instansi yang berkaitan, temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, bagi pihak lain, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai rujukan untuk melakukan penelitian sejenis di waktu mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk menghasilkan alur yang logis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan ini disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Tesis ini terdiri dari 4 bab yang dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari: penjelasan teori-teori yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti, ringkasan tinjauan empiris.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini terdiri dari: kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang: Rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang: Deskripsi data, Gambaran umum objek penelitian, Deskripsi Hasil penelitian, Analisis Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Uji regresi linear berganda dan Uji regresi moderasi.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari setiap hipotesis dalam penelitian ini.

BAB VII PENUTUP

Bab ini membahas tentang: kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan kolaborasi kerja antara dua pihak, dimana satu pihak (*principal*) membuat kesepakatan dengan pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan atas nama *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham, para pemegang saham ini berperan sebagai pemilik (*principal*), sedangkan direksi bertindak sebagai wakil mereka (*agent*). Hal ini karena pemegang saham memberikan kepercayaan kepada direksi agar bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Akbar, 2017). Hubungan ini menunjukkan bahwa walaupun agen dan principal bekerja sama, mereka seringkali memiliki tujuan yang tidak sama dan pandangan yang berbeda terhadap risiko (Eisenhardt et al., 1989). Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa kerja sama yang baik belum tentu menjamin kelancaran operasional perusahaan. Jika agen memiliki tujuan dan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi risiko, mereka bisa saja mengambil keputusan yang merugikan. Oleh karena itu, direksi yang diberi wewenang oleh pemilik seharusnya lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pelaksana ini dikenal dengan istilah *conflict of interest* atau benturan kepentingan.

Conflict of interest muncul karena dalam teori agensi diasumsikan bahwa setiap orang cenderung bertindak berdasarkan apa yang menguntungkan dirinya sendiri (Isnaeni, 2023). Karena itu, seorang agen yang diberi tanggung jawab

besar oleh pemberi tugas seringkali terhasut untuk menyalahgunakan kepercayaan tersebut demi kepentingan sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan antara teori agensi dan konsep fraud hexagon dalam mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan terlihat dari peran manajemen sebagai pihak yang dipercaya oleh investor (principal). Tanggungjawab untuk mempertahankan kepercayaan tersebut membuat manajemen merasa tertekan untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik di hadapan investor. Untuk menjaga citra dan kepercayaan investor terhadap perusahaan, manajemen terkadang melakukan tindakan manipulatif, seperti melakukan pemalsuan laporan keuangan agar perusahaan terlihat sehat secara finansial. Tekanan ini merupakan salah satu elemen penting dalam hexagon, yang menjelaskan bahwa pelaku kecurangan biasanya berada dalam kondisi tekanan yang berat untuk memenuhi target tertentu (Horwath, 2011).

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bisa terjadi karena adanya peluang yang muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal dalam perusahaan. Ketika sistem pengawasan lemah atau tidak berjalan efektif, manajemen memiliki peluang untuk melakukan manipulasi tanpa terdeteksi (Albretch et al., 2012). Selain itu, kecurangan sering kali dibenarkan oleh pelaku melalui rasionalisasi (*rationalization*) bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan atau untuk memenuhi ekspektasi principal. Pelaku kerap kali meyakini bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah hal yang wajar atau "diperbolehkan" dalam situasi tertentu (Clinard & Cressey, 1953). tetapi, fraud tidak mungkin terjadi apabila agen tidak memiliki kemampuan (*capability*) dalam membaca dan mengelola situasi perusahaan. Kemampuan ini mencakup

kecerdasan, pengalaman, posisi otoritas, serta keterampilan dalam mengeksploitasi sistem untuk keuntungan pribadi (Wolfe & Hermanson, 2004).

Selanjutnya, arogansi (*arrogance*) juga menjadi faktor penting, di mana pimpinan perusahaan menunjukkan sikap merasa superior atau tidak tersentuh, sehingga merasa memiliki hak untuk melakukan manipulasi demi menunjukkan keberhasilannya kepada principal. Arogansi ini sering kali diwujudkan melalui kemampuan untuk mempengaruhi bawahan agar terlibat dalam tindakan kecurangan (Dorminey et al., 2012). Selain itu, faktor kolusi (*collusion*) juga tidak kalah penting. Kolusi terjadi ketika dua pihak atau lebih bekerja sama untuk melakukan kecurangan, yang membuat tindakan tersebut lebih sulit dideteksi. Dalam konteks teori agensi, kolusi dapat terjadi antara agen dan pihak lain (misal, auditor eksternal atau pemasok), maupun antara sesama karyawan, untuk menyembunyikan informasi atau manipulasi laporan keuangan. Kolusi merusak sistem pengendalian internal karena pelaku bekerja sama untuk menutupi jejak kecurangan. Menurut (Alfarago et al., 2023), kolusi adalah salah satu hambatan terbesar dalam mendeteksi fraud karena menghilangkan elemen pengawasan antar individu dalam organisasi.

2.1.2 Financial Statement Fraud

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, laporan keuangan adalah salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan, yang berisi susunan informasi secara sistematis tentang keadaan keuangan dan hasil usaha suatu organisasi. Kecurangan laporan keuangan merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja terhadap informasi keuangan perusahaan, baik dengan cara memalsukan data atau menghilangkan

informasi penting dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk menipu pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut.

Menurut (Saleh et al., 2021) contoh kecurangan ini bisa berupa pelaporan beban operasional yang lebih kecil dari sebenarnya atau pendapatan yang lebih besar, agar laba perusahaan terlibat lebih tinggi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa *financial statement fraud* adalah tindakan yang disengaja atau karena kelalaian dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tindakan ini bersifat signifikan dan bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Menurut AICPA (*American Institute of Public Accountant*), kecurangan ini mencakup kesenjangan dalam menyampaikan informasi yang tidak benar, menghilangkan fakta penting, atau membuat laporan yang menyesatkan. Jika semua informasi yang seharusnya disajikan dipertimbangkan, tindakan tersebut dapat membuat pembaca laporan mengambil keputusan yang salah.

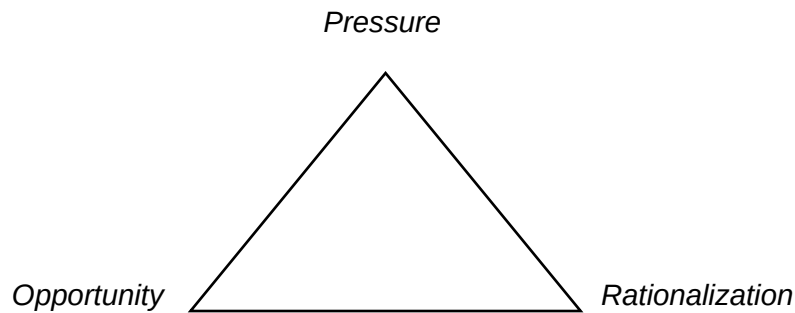
Menurut (Wells, 2011), kecurangan dalam laporan keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: (1) memalsukan, mengubah, atau memanipulasi catatan akuntansi, dokumen pendukung, atau data transaksi perusahaan; (2) sengaja tidak mencantumkan informasi penting seperti kejadian, transaksi, akun, atau data relevan lain yang seharusnya disampaikan dalam laporan keuangan; (3) dengan sengaja menyalahgunakan aturan akuntansi, kebijakan, atau prosedur yang berlaku dalam proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan aktivitas ekonomi serta transaksi; (4) tidak menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan prinsip atau kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

2.1.3 *Fraud Hexagon Theory*

Teori kecurangan (*fraud theory*) telah mengalami banyak perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya sejumlah variabel baru yang ditambahkan ke dalam teori tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih seringnya terjadi kecurangan setiap tahunnya, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia dengan beragam alasan. Kondisi ini mendorong banyak peneliti untuk menelusuri faktor-faktor tersebut dan mengintegrasikannya sebagai variabel baru dalam kerangka teori kecurangan.

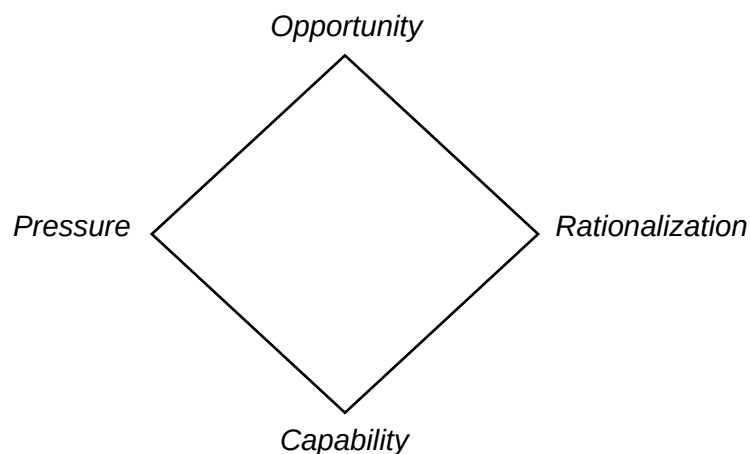
Teori *fraud* pertama kali dikenalkan oleh Clinard & Cressey, (1953) yang kemudian dikenal sebagai teori *Fraud Triangle*. Teori ini mulai dikenal secara luas dalam literatur professional melalui SAS No.99. Dalam penjelasannya, Cressey menyatakan bahwa terdapat tiga elemen utama yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan. Pertama adalah tekanan (*pressure*), yang menjadi pemicu utama bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Kedua adalah kesempatan (*opportunity*), yakni peluang yang muncul di dalam perusahaan, biasanya berkaitan dengan posisi atau jabatan, yang memungkinkan individu melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Ketiga, Cressey menyebut rasionalisasi (*rationalization*), dimana pelaku menyadari bahwa tindakannya salah, namun membenarkannya dengan berbagai alasan hingga mereka menganggap perbuatannya tersebut dapat diterima.

Gambar berikut menunjukkan ringkasan dari teori *fraud hexagon*:



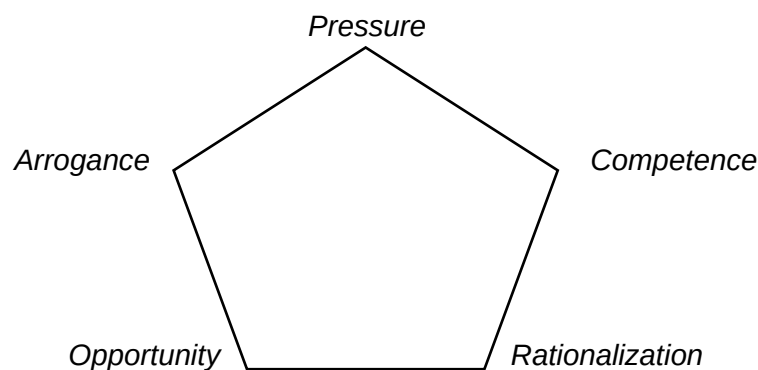
Gambar 2.1. Fraud Triangle Model oleh Donald R. Cressey (1953)

Perkembangan teori fraud berlanjut pada Wolfe & Hermanson, (2004), yang mengemukakan bahwa kecurangan tidak akan dapat terjadi tanpa adanya kemampuan dari pelakunya. Menurut mereka, dalam melakukan fraud, seseorang harus mampu memanfaatkan keahlian dan pengalamannya pada saat yang tepat. Kemudian, konsep fraud triangle disempurnakan menjadi fraud diamond dengan menambahkan satu unsur baru, yaitu kemampuan (*capability*). Teori fraud diamond menekankan bahwa karakteristik individu serta kemampuannya memegang peranan penting dalam terjadinya tindakan kecurangan. Salah satu indikator dari elemen kemampuan ini dapat dilihat dari latar belakang Pendidikan pimpinan perusahaan, seperti CEO.



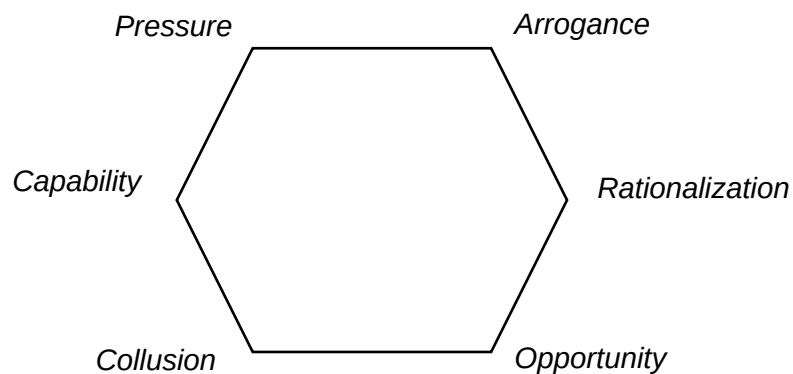
Gambar 2.2. Fraud Diamond oleh Wolfe dan Hermanson, (2004)

Pada tahun 2011, Crowe Horwath melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap teori fraud diamond, yang kemudian dikenal sebagai fraud pentagon. Teori ini menambahkan dua elemen baru, yaitu kompetensi (*competence*) yang memiliki arti serupa dengan *capability*, serta arogansi (*arrogance*). Menurut Horwath (2011), kompetensi merujuk pada kemampuan individu, seperti kecenderungan untuk mengabaikan sistem pengawasan dalam organisasi, merancang strategi tersembunyi guna mengendalikan berbagai kemungkinan situasi demi memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan pihak lain. Sementara itu, arogansi menggambarkan sikap seseorang yang merasa dirinya berada di atas aturan. Individu dengan sifat ini kerap merasa bahwa control, pengawasan, serta peraturan perusahaan tidak berlaku bagi dirinya karena menduduki posisi tinggi dalam struktur organisasi.



Gambar 2.3. Fraud Pentagon oleh Horwath (2011)

Perkembangan terbaru muncul dari (Vousinas, 2019), memperkenalkan teori *fraud hexagon*. Teori ini menambahkan satu unsur lagi, yaitu kolusi (kerja sama antar pelaku), sehingga total ada enam faktor yang dikenal dengan model S.C.O.R.E., yaitu *Stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *rationalization* (rasionalisasi), *Capability* (kemampuan), ego dan *collusion* (kolusi). Gambar berikut menunjukkan ringkasan dari teori *fraud hexagon*:



Gambar 2.3. Fraud Hexagon Model oleh Vousinas (2019)

1. Tekanan (*Pressure*)

Unsur pertama dalam fraud hexagon adalah *pressure/stimulus*. Menurut (Sahla & Ardianto, 2024), tekanan atau insentif yang dapat mendorong terjadinya kecurangan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti tekanan pribadi, tekanan dalam lingkungan kerja atau perusahaan, serta tekanan dari pihak luar. Pada tingkat individu, tindakan curang dapat disebabkan oleh tekanan keuangan maupun tekanan non-keuangan (Gbegi & Adebisi, 2013). Tekanan keuangan biasanya berkaitan dengan gaya hidup seseorang, sedangkan tekanan non-keuangan berkaitan dengan sifat tamak serta kurangnya kedisiplinan dalam mengelola keuangan.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasanya membutuhkan dana tambahan untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional. Ketika proporsi pembiayaan dari utang semakin besar, maka tanggungan kewajiban perusahaan juga meningkat, yang dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan kerugian. Karena itu, pihak manajemen terkadang mencoba mengatur isi laporan keuangan dari menurunkan nilai risiko utangnya agar beban pinjaman terlihat kecil, sehingga kondisi keuangannya tampak lebih baik dari sebenarnya (Faradiza, 2019). Pada penelitian ini, tekanan diartikan sebagai tekanan dari luar perusahaan (*external*

pressure), yang dinilai berdasarkan rasio utang terhadap aset. Perhitungan rasio ini mengacu pada rumus dari (Situngkir & Triyanto, 2020):

$$Leverage = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset}$$

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kemungkinan terjadinya kecurangan bisa muncul karena lemahnya pengawasan dari perusahaan terhadap kinerja karyawannya (Purnaningsih et al., 2020). Unsur kedua dalam fraud hexagon adalah kesempatan, yaitu situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan curang. Peluang ini biasanya terbuka karena lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan dari manajemen. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari perilaku curang di dalam organisasi. Salah satu langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan adalah dengan melakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kajian ini, unsur kesempatan dipresentasikan melalui indikator lemahnya pengawasan atau *ineffective monitoring*.

Mengacu pada American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 2002), *ineffective monitoring* menggambarkan keadaan dimana mekanisme pengendalian perusahaan tidak berjalan secara maksimal, sehingga membuka ruang bagi kecurangan. Indikator ini dinilai melalui persentase keberadaan komisaris independen (BDOUT), yang mencerminkan seberapa kuat atau lemahnya sistem pengawasan yang ada (Agusputri & Sofie, 2019). Rasio keberadaan komisaris independent (BDOUT) ini dihitung menggunakan rumus dari (Husmawati et al., 2017):

$$BDOUT = \frac{Jumlah\ Dewan\ Komisaris\ Independen}{Total\ Dewan\ Komisaris}$$

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Tindakan yang dilakukan tidak akan merugikan orang lain dan individu, segera mengembalikan barang yang diambil dari perusahaan. Umumnya, karyawan yang melakukan kecurangan akan melakukan rasionalisasi dengan meyakini bahwa tindakannya diperlukan (Vousinas, 2019). Rasionalisasi merupakan proses di mana individu mencari alasan untuk membenarkan perilaku tidak jujur agar tampak dapat diterima (Omar et al., 2015). Pelaku secara sadar merasionalisasi tindakannya dengan memberikan justifikasi, seperti menganggap bahwa dana perusahaan hanya dipinjam sementara dan tidak menimbulkan kerugian. Bahkan, individu yang awalnya tidak berniat melakukan kecurangan dapat terdorong untuk melakukannya karena perilaku tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah. Situasi ini berisiko menumbuhkan budaya menyimpang dalam organisasi maupun masyarakat, di mana pelanggaran hukum oleh anggota organisasi atau komunitas menjadi sesuatu yang dapat dimaklumi. Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba mengembangkan proksi untuk setiap elemen dalam Teori Hexagon, namun merumuskan proksi yang tepat untuk rasionalisasi, khususnya dalam konteks kecurangan laporan keuangan, masih menjadi tantangan (Hogan et al., 2008).

Dalam penelitian ini, aspek rasionalisasi diwakili oleh tindakan perusahaan yang mengganti auditor atau beralih di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda. Pergantian auditor bisa dilihat sebagai upaya perusahaan untuk menghilangkan jejak kecurangan yang mungkin sudah teridentifikasi oleh auditor sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan sering melakukan rotasi auditor independen sebagai cara untuk menyembunyikan praktik curang yang telah dilakukan. Variabel pergantian auditor dijadikan sebagai indikator dari rasionalisasi dan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, di mana angka 1 menunjukkan adanya pergantian

auditor selama masa penelitian, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak ada perubahan auditor (Utomo et al., 2019).

4. Kemampuan (*Competence*)

Kapabilitas dipandang sebagai unsur keempat yang krusial dalam Teori Hexagon Kecurangan. Elemen ini mendorong individu untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tindakan curang. Semakin tinggi kemampuan karyawan dalam menyusun laporan keuangan, semakin besar pula potensi mereka untuk menjalankan manipulasi terhadap laporan tersebut. Selain itu, posisi atau jabatan dalam perusahaan juga memberikan otoritas yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kecurangan. (Wolfe & Hermanson, 2004) turut menegaskan bahwa *fraud* berkaitan erat dengan tingkat jabatan dan kecerdasan individu.

Banyak kasus kecurangan, terutama dalam laporan keuangan dengan nilai mencapai miliaran dolar, tidak akan terjadi tanpa keterlibatan individu yang mempunyai keahlian dan posisi yang strategis untuk melakukannya (Vousinas, 2019) dan (Wolfe & Hermanson, 2004). Kemampuan manajerial dalam menjalankan perusahaan seringkali berkaitan dengan tingkat pengalaman serta durasi seseorang menduduki posisi tertentu. Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004), individu yang paling berpotensi menjalankan *fraud* adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengenali dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan manipulasi. Semakin lama seseorang menjabat sebagai bagian dari manajemen puncak, semakin dalam pula pemahamannya terhadap proses operasional perusahaan, hingga, ia memiliki kesempatan yang lebih untuk mengidentifikasi celah di dalam pengendalian internal dan memanfaatkannya dalam tindakan kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian ini, kemampuan (*competence*) diukur menggunakan proksi pergantian direksi (DCHANGE) yang

dinyatakan dalam bentuk variabel dummy. Nilai 1 diberikan apabila dalam periode penelitian perusahaan melakukan perubahan dalam struktur atau susunan direksi, sedangkan Nilai 0 diberikan apabila tidak terjadi perubahan apapun dalam susunan direksi selama periode tersebut (Einde et al., 2019).

5. Sifat arogansi (*Arrogance*)

Arogan atau rasa angkuh berhubungan dengan keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan segala hal sesuai keinginannya, termasuk tindakan kecurangan. Oleh karena itu, Arogansi menjadi elemen kelima dalam Teori Fraud Hexagon. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu cenderung memperhatikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Mereka berusaha membangun dan menjaga reputasi atau status dalam kehidupan sosial. Arogansi mendorong seseorang untuk merasa lebih unggul, memiliki sifat arogan, berwibawa, haus akan pengakuan, serta cenderung mementingkan diri sendiri. Individu dengan ego yang tinggi yang melakukan kecurangan cenderung tidak merasa gentar terhadap ancaman hukuman (Sahla & Ardianto, 2024).

Menurut (Hidayah & Saptarini, 2019) mengemukakan bahwa arogansi atau ego mencerminkan sifat individu yang seakan mempunyai kontrol penuh dari segala hal dalam organisasi. Individu dengan karakter seperti ini cenderung berani melakukan kecurangan karena merasa bahwa aturan organisasi maupun sistem pengendalian internal tidak berlaku bagi dirinya. Terdapat pandangan bahwa pejabat dengan jabatan tinggi cenderung memiliki tingkat arogansi yang besar. Menurut (Aprilia, 2017), sikap arogan dan rasa superior yang melekat pada seorang CEO berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Peran media juga sangat signifikan dalam membentuk citra seorang CEO, khususnya mereka yang ingin tampil sebagai sosok kunci dalam kesuksesan perusahaan, yang pada akhirnya mencerminkan ego mereka. CEO kerap menunjukkan posisi dan

statusnya melalui berbagai pemberitaan tentang prestasi kepemimpinannya, yang berdampak langsung pada reputasi dan citra dirinya (Francis et al., 2010). Selain itu, tingkat kesombongan seorang CEO juga dapat dilihat dari frekuensi kemunculan fotonya dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin sering foto CEO ditampilkan, semakin besar pula indikasi egonya, yang bisa mendorong keberanian untuk menjalankan manipulasi dalam pelaporan keuangan. Penelitian terdahulu oleh (Faradiza, 2019) menyatakan bahwa tingkat sikap arogan atau rasa superior yang dimiliki oleh CEO dapat tercermin dari jumlah kemunculan foto CEO dalam laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sikap arogan diukur berdasarkan frekuensi kemunculan gambar atau foto CEO yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

6. Kolusi (*Collusion*)

Kolusi merupakan elemen terakhir dalam *Fraud Hexagon Theory*. Ketika individu bekerja sama kepada pihak lain, baik dari dalam maupun luar organisasi, potensi terjadinya kecurangan menjadi lebih besar dan dampaknya pun lebih serius. Kolusi dapat berlangsung di antara karyawan dalam satu perusahaan (kolusi internal) maupun antara karyawan dan pihak eksternal (kolusi eksternal), dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama (Vousinas, 2019).

Kolusi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecurangan yang dianggap sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerugian besar. Kolusi biasanya muncul ketika terdapat hubungan yang erat di antara beberapa individu dalam suatu kelompok. Praktik ini cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, dan risiko serta kompleksitas kecurangan akan meningkat jika kolusi terjadi dalam lingkungan perusahaan (Vousinas, 2019). (Sitorus & Scott, 2010) menambahkan bahwa hubungan erat antar individu dalam kelompok yang saling melindungi dapat mendorong terjadinya transaksi yang bertentangan dengan

hukum. Hubungan semacam ini secara alami menciptakan loyalitas timbal balik yang memperbesar peluang terjadinya kolusi. Dalam konteks perusahaan, kolusi dapat dikenali melalui adanya transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan khusus atau disebut transaksi pihak terkait (*related party transaction/RPT*) (Yusrianti et al., 2020). Pihak terkait ini mencakup individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan, seperti anggota dewan direksi, asosiasi perusahaan, pemegang saham pengendali, serta pemegang saham minoritas (Mohammed, 2019). Kolusi menjadi sebuah kolaborasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki potensi untuk menjalankan tindakan *fraud*, untuk itu, kolusi diprosikan atau diukur dengan Jumlah total komisaris yang memiliki jabatan rangkap (Vousinas, 2019).

2.1.4 Komite Audit

Komite audit sebagai mana diatur oleh pemerintah Indonesia tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK/04/2015, yang menyebutkan bahwa, komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris, dengan tujuan utama membantu pelaksanaan fungsi dan kewenangan dewan komisaris. Selain itu, menurut Dimuk et al (2022), komite audit berperan dalam memberikan pandangan professional yang bersifat independent kepada dewan komisaris terkait laporan maupun hal lain yang disampaikan oleh direksi. Komite ini juga memiliki tanggungjawab dalam mengidentifikasi berbagai isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dari dewan komisaris.

Sementara itu, dalam pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa, jumlah anggota komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang, yang berasal dari komisaris independen serta pihak luar dari emiten atau perusahaan publik. Atau dalam beberapa kasus bisa mencapai tujuh orang, yang semuanya berasal dari

luar jajaran manajemen perusahaan. Komite audit ini juga menjadi bagian dari dewan komisaris, dengan fungsi utama mengawasi jalannya operasional perusahaan. Lebih lanjut, Januanto (2018), menjelaskan bahwa peran utama komite audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun tidak menyesatkan dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Komite ini juga bertugas menjamin kecukupan sistem pengendalian internal, menindaklanjuti dugaan penyimpangan material dalam bidang keuangan beserta implikasi hukumnya, serta mendorong dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan wajib memiliki minimal tiga orang anggota komite audit. Semakin besar jumlah anggota komite, maka semakin optimal pula proses pengawasan dan pemantauan terhadap operasional perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian mengenai penggunaan teori *fraud hexagon* untuk mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan fokus pada berbagai sektor industri tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung penelitian ini. Berbagai penelitian telah mendeteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan model *fraud hexagon*, menghasilkan beragam temuan.

Tarmizi Achmad dkk. (2023) menganalisis kecurangan di sektor perbankan, menemukan bahwa tekanan eksternal dan arogansi signifikan mempengaruhi kecurangan, sementara faktor lain tidak. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan memiliki kesamaan variabel dependen, namun

beberapa proksi *pressure* dan sektor sampel yang berbeda dengan penelitian ini yaitu sektor pertambangan.

Nanang Setiawan dan Noorlailie soewarno (2025) menguji persepsi kecurangan manajer, menemukan bahwa tekanan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan, dengan budaya perusahaan sebagai moderator. Penelitian ini berjenis kuantitatif, namun berbeda dalam alat analisis (PLS-SEM) sedangkan peneliti menggunakan SPSS 25 dan variabel dependen yang berbeda yaitu persepsi manajer yang digunakan peneliti terdahulu dan kecurangan laporan keuangan yang di gunakan oleh peneliti.

Tarmizi Achmad dkk. (2022) mendeteksi kecurangan di BUMN, menunjukkan stabilitas keuangan dan tekanan eksternal berpengaruh positif, sementara faktor lain tidak signifikan. Penelitian ini serupa dalam analisis regresi logistik dan variabel dependen, namun berbeda periode penelitian dan objek penelitian.

Lely Indriaty dan Gen Nor Thomas (2023) menganalisis pengaruh factor hexagon fraud terhadap FFR di BUMN. Mereka menemukan peluang, arogansi, dan kemampuan berpengaruh signifikan, sedangkan tekanan, rasionalisasi dan kolusi tidak. Penelitian ini kuantitatif, namun berbeda alat analisis dan objek penelitian.

Aini Indrijawati dkk. (2025) meneliti kecurangan akuntansi di pemerintah daerah, menemukan tekanan, kolusi, peluang dan rasionalisasi meningkatkan korupsi, sementara arogansi menurunkannya. Penelitian ini fokus pada kecurangan dan fraud hexagon, namun berbeda objek penelitian dimana peneliti terdahulu mengambil objek pemerintahan, metode analisis regresi berganda dan variabel dependen yaitu korupsi.

Ni Nyoman Ayu Suryandari dkk. (2023) meneliti perilaku curang Karyawan bank pedesaan, menemukan tekanan, kesempatan, rasionalisasi, ego, dan *power distance* berpengaruh positif, dengan nilai etika sebagai moderator. Penelitian ini menggunakan purposive sampling namun berbeda jumlah variabel independent dan alat analisis.

Maylia Pramono Sari dkk. (2022) menganalisis pengaruh fraud hexagon terhadap FFR di perusahaan tambang, dengan komite audit sebagai moderasi. Pergantian direktur berdampak negatif, karakteristik industry positif, dan komite audit memoderasi beberapa faktor. Penelitian ini sama-sama meneliti di sektor pertambangan, namun berbeda alat analisis dan periode pengamatan.

Amiruddin Junus dkk. (2025) menganalisis FFR dan nilai perusahaan di sektor pertambangan. Tekanan berpengaruh positif signifikan, peluang negatif signifikan, sementara faktor lain tidak. FFR juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini serupa sektor dan periode, namun berbeda alat analisis.

Terakhir Maylia Pramono Sari dkk. (2024) menganalisis pengaruh fraud hexagon terhadap FFR dengan komite audit dan komisaris independen sebagai moderator. Stabilitas keuangan berpengaruh positif, sementara beberapa faktor lain negative. Komite audit dan komisaris independen mampu memoderasi sebagian besar variabel. Penelitian ini serupa dalam penggunaan moderasi komite audit, namun berbeda indikator proksi.